

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menyimpulkan bahwa peran *Plan International UK* dalam mendorong terbentuknya kebijakan *Period Product Bills* berhasil, sehingga kebijakan ini kemudian bisa dianggap kebijakan yang efektif dalam mengatasi permasalahan *period poverty* melalui penyediaan akses produk menstruasi secara gratis, kampanye edukatif, dan perubahan paradigma kebijakan sosial. Penelitian ini juga merekomendasikan agar kebijakan serupa diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi lokal. Kebijakan menstruasi gratis bukan hanya tentang produk, tetapi juga soal kesetaraan, martabat, dan hak asasi manusia.

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari *Plan International UK* terhadap kebijakan *Period Product Bills* dalam upaya pemerintah mengatasi permasalahan *period poverty* di Skotlandia dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan konsep *Life Cycle of Norms* (Finnemore & Sikkink, 1998), penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil dari proses panjang advokasi normatif yang melibatkan aktor internasional, masyarakat sipil, dan pemerintah Skotlandia.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan beberapa poin utama berikut:

- 1) ***Period poverty* di Skotlandia merupakan masalah sosial yang nyata dan berdampak luas**, terutama pada remaja perempuan dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya akses terhadap produk menstruasi, tetapi juga menyangkut stigma sosial, kurangnya pendidikan menstruasi, serta ketimpangan gender dalam akses layanan kesehatan dasar.
- 2) **Peran *Plan International UK* sangat penting dalam mendorong terbentuknya kebijakan ini**, terutama pada tahap awal pembentukan

norma dan agenda-setting kebijakan. Melalui publikasi laporan *Break the Barriers* (2018), kampanye publik #MenstruationMatters, serta kerja sama strategis dengan aktor legislatif seperti Monica Lennon, *Plan International UK* berfungsi dalam membangun narasi menstruasi sebagai isu keadilan sosial dan hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran publik dan menghapus stigma, memberikan legitimasi moral dan empiris terhadap urgensi intervensi kebijakan.

- 3) **Melalui pendekatan teori *Life Cycle of Norms*, keberhasilan kebijakan ini dapat dipahami sebagai hasil dari proses normatif yang melibatkan perubahan persepsi sosial terhadap menstruasi.** *Plan International UK* bertindak sebagai *norm entrepreneur* yang memperkenalkan norma baru, mendorong penyebarannya melalui kampanye dan koalisi, hingga norma tersebut diterima dan dilembagakan dalam bentuk hukum nasional.
- 4) **Kebijakan ini berhasil dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap produk menstruasi,** khususnya bagi perempuan dalam kelompok rentan seperti pelajar, perempuan dengan penghasilan rendah, dan masyarakat marginal. Produk disediakan secara gratis di berbagai lokasi publik dan juga melalui layanan daring yang dapat diakses secara anonim.
- 5) **Kebijakan ini turut menurunkan ketidakhadiran di sekolah dan meningkatkan partisipasi sosial** bagi perempuan dan remaja perempuan selama masa menstruasi, yang sebelumnya terhambat karena adanya keterbatasan akses terhadap produk menstruasi.
- 6) **Kebijakan ini berkontribusi dalam mengurangi stigma seputar menstruasi,** melalui kampanye edukatif yang menyertai implementasi program. Menstruasi tidak lagi dianggap isu yang tabu, tetapi sebagai sebuah persoalan publik yang memerlukan perhatian negara.
- 7) **Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan pendekatan berbasis hak dalam penyusunan kebijakan sosial,** yang dapat menjadi model progresif untuk negara-negara lain dalam mengatasi *period poverty* dan mendorong keadilan berbasis gender.

- 8) **Implementasi kebijakan menunjukkan kombinasi keberhasilan dan tantangan**, dimana keberhasilan mencakup penyediaan produk secara luas di fasilitas publik dan peningkatan kesadaran publik. Namun, tantangan tetap ada dalam bentuk distribusi yang tidak merata, keterbatasan anggaran lokal, serta belum meratanya pemahaman masyarakat tentang keadilan menstruasi. Hal ini menandakan bahwa meskipun norma telah diinternalisasi secara hukum, proses internalisasi substansial masih berlangsung dan perlu konsolidasi lebih lanjut.
- 9) ***Period Product Bills* berdampak nyata terhadap pengurangan *period poverty* di Skotlandia, namun belum menghilangkan sepenuhnya hambatan struktural yang ada**, kebijakan ini merupakan langkah maju yang signifikan, namun tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan kebijakan lain seperti edukasi menstruasi, reformasi sistem sanitasi, dan peningkatan pemahaman gender untuk dapat benar-benar menghapuskan *period poverty* dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *Period Product Bills* merupakan bentuk respon aktif pemerintah Skotlandia terhadap tekanan dan pengaruh dari aktor internasional yang mendorong penghapusan *period poverty* sebagai bagian dari agenda keadilan sosial dan kesetaraan gender. Aktor internasional berperan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari pembentukan wacana, penyusunan isi kebijakan, hingga dalam proses implementasi.

Aktor internasional yang terlibat tidak hanya menyuplai data dan laporan digital tentang *period poverty* saja, tapi juga mendorong pembentukan norma bahwa akses terhadap produk menstruasi merupakan salah satu hak dasar manusia. Skotlandia kemudian merespon norma ini sebagai bagian dari komitmennya terhadap nilai-nilai global. Dalam tahap implementasi, aktor internasional berkontribusi melalui kemitraan strategis dalam distribusi produk menstruasi gratis, pendidikan, dan pemantauan program. Keterlibatan mereka juga memperkuat konteks implementasi sebagaimana dijelaskan dalam teori Grindle, dimana

keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh dukungan lingkungan eksternal dan jaringan aktor pelaksana.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa aktor internasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berjalannya kebijakan *Period Product Bills* di Skotlandia, baik secara konseptual, normatif, maupun praktis, dan peran mereka turut memperkuat upaya negara dalam mengatasi permasalahan *period poverty* secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan *Period Product Bills* dapat dianggap sebagai hasil keberhasilan normatif dan politik, sekaligus sebagai proyek sosial yang sedang berjalan dalam proses pelebagaan keadilan menstruasi. Studi ini juga menegaskan pentingnya peran aktor non-negara dalam membentuk kebijakan publik, serta pentingnya meninjau kebijakan dari perspektif dinamika norma dan bukan hanya aspek teknokratis.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Bagi pemerintah Skotlandia

- 1) Memperkuat sistem pemantauan dan melakukan evaluasi secara berkala untuk dapat memastikan distribusi produk berjalan secara merata antarwilayah.
- 2) Meningkatkan keberagaman produk menstruasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan individu dan preferensi lingkungan (seperti menyediakan menstrual cup ataupun pembalut kain yang lebih ramah lingkungan).
- 3) Melanjutkan kampanye edukatif secara berkelanjutan untuk dapat memperkuat perubahan budaya dan dapat menghapus stigma negatif seputar menstruasi secara menyeluruh.

2. Bagi negara lain

- 1) Studi kasus Skotlandia dapat menjadi rujukan dalam merancang sebuah kebijakan tentang menstruasi berbasis hak yang berkelanjutan dan inklusif.

- 2) Penting untuk menyesuaikan model kebijakan dengan konteks lokal, baik dari segi kapasitas fiskal, struktur birokrasi, maupun nilai budaya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

- 1) Diharapkan ada penelitian lanjutan yang mengeksplorasi perspektif pengguna secara langsung melalui pendekatan wawancara atau observasi lapangan.
- 2) Kajian perbandingan antara kebijakan Skotlandia dan kebijakan serupa di negara lain dapat memperkaya pemahaman tentang efektivitas intervensi kebijakan menstruasi secara global.